

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa merupakan faktor terpenting. Paradigma pembangunan desa saat ini berubah dengan cepat, sehingga diperlukan aparat pemerintah desa yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurut pendapat Sutrisna (2021) mengatakan bahwa keberhasilan demokrasi di desa akan menentukan keberhasilan dalam pencapaian pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa harus bisa menjadi pilar pembangunan dan demokrasi di desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 memperjelas posisi desa di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena desa yang secara langsung ditata oleh pemerintah pusat melalui kementerian yang secara khusus bertanggung jawab atas desa.

Sementara Roza & Arliman (2018) berpendapat bahwa kewenangan, fungsi serta kedudukan BPD terus mengalami perubahan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan BPD menjadi lebih baik lagi. Perubahan terhadap BPD berkaitan dengan perubahan yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD juga mempengaruhi kondisi demokrasi di desa, dampak perubahan kelembagaan ini berdampak positif bagi implementasi pemerintahan dan pemantauan di desa. Namun terdapat pula dampak negatif bagi hubungan kelembagaan desa serta masyarakat pada umumnya.

Tingkat pemahaman aparaturnya desa dan para anggota BPD dalam menjalankan demokrasi juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik dalam hubungan kelembagaan di desa. Peran BPD yang juga ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di desa membuat kini BPD menjadi lembaga yang diharapkan oleh masyarakat bisa bekerja membangun desa dan saat ini pemerintah sedang menjalankan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), bertujuan agar tidak ada lagi desa di Indonesia yang tertinggal atau terlambat pembangunannya. Kurangnya partisipatif Aparatur Desa dan BPD terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi sebuah permasalahan yang ada di Desa Telaga Murni, dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam hal pelaksanaan program ataupun mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan BPD ikut andil dalam penyampaian informasi terkait keluhan atau masukan dari masyarakat desa. Saat ini Desa Telaga Murni sedang menjalankan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana masyarakat harus mengetahui dan terlibat karena program tersebut ada dan untuk masyarakat.

Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah perubahan atas program sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Pada tanggal 14-16 september 2005 dilakukan sidang umum PBB yang ke-60 dimana membahas tentang evaluasi 5 tahun implementasi MDGs. Hasil dari evaluasi tersebut menyebutkan terdapat 50 negara masih gagal dalam mencapai paling sedikit satu target dan sebanyak 65 negara beresiko untuk sama sekali gagal mencapai sedikitnya satu target MDGs sampai 2040.

Pada Desember 2015 merupakan titik terakhir dalam implementasi MDGs di semua negara, Indonesia menjadi salah satunya. Indonesia telah mencapai 49 dari 67 indikator target di tahun terakhir pelaksanaan MDGs. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dikutip dari portal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDESA) menyebutkan dengan berakhirnya MDGs adalah titik awal bagi negara-negara di seluruh dunia untuk merencanakan strategi baru untuk pembangunan global sebagai tindak lanjut dan keberlanjutan dari MDGs.

Setelah itu sebanyak 193 negara dengan mufakat menyepakati dokumen pembangunan global baru bertema *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada 2 Agustus 2015 bertempat di New York (Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa). Kemudian perwakilan dari 193 negara tersebut selanjutnya mengadakan sebuah pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit* ditempat yang sama pada tanggal 25-27 September 2015. Hasil dari pertemuan tersebut menyepakati dan mengesahkan dokumen pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan dibagi kedalam 169 target: yang saling terkait, saling mempengaruhi, inklusif dan saling terintegrasi, universal atau tidak seorang pun yang terlewatkan (*Leave No One Behind*) dengan jangka waktu hingga tahun 2030 yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dokumen tersebut merupakan komitmen warga global untuk kehidupan manusia yang lebih baik, pilar baru pembangunan nasional, dan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

SDGs mencakup isu-isu pembangunan dalam skala yang lebih besar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, bertujuan untuk melengkapi tujuan dan sasaran yang belum ada di dalam MDGs.

Dalam proses merumuskannya, SDGS lebih partisipatif karena tidak hanya melibatkan birokratis melainkan adanya keterlibatan dari Lembaga non-pemerintah/*Non Government Organization* (NGO), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi/akademisi, sektor bisnis, swasta dan kelompok kepentingan lainnya.

Ide pengembangan SDGs mengacu kepada tiga pilar utama, berupa pembangunan manusia (*Human Development*), lingkungan sosial ekonomi (*Social Economic Development*), dan pengembangan lingkungan (*Environmental Development*). Hal itu menunjukkan bahwa SDGs adalah inisiatif untuk global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi dan dapat bersinergi dengan lingkungan.

Pada tanggal 4 Juli 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo, menandatangani peraturan presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs, hal itu menandakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menjalankan agenda SDGs. Dikutip dari Sekretariat Kabinet RI (2017) menyebutkan bahwa melalui Perpres di atas, dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantuaan, dan evaluasi Rencana Aksi Nasional maupun Daerah yang dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadikan SDGs sebagai pedoman untuk pengimplementasian tersebut.

Tidak hanya itu, SDGs digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Masyarakat (ORMAS), Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan aksi pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan oleh Sitti Roskina (2021) mengatakan bahwa secara mendasar SDGs mengatur keseluruhan aspek pembangunan manusia dan telah lama diadopsi oleh Indonesia. Hasil dari evaluasi SDGs secara global memperlihatkan Indonesia sudah baik dalam dukungan kebijakan untuk seluruh tujuan pembangunan.

Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam implementasi kegiatan, perwujudan keadilan dan keamanan serta partisipasi antar pihak masih memiliki kelemahan, terutama yang terjadi di tatanan terbawah struktur pemerintahan yaitu tingkat desa. Pelaksanaan SDGs di Indonesia terus berlanjut dan munculnya lembaga khas desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), untuk itu dirumuskan SDGs Desa yang ke 18 berisi tentang kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi di tingkat desa dan pelaksanaan tujuan pembangunan desa yang benar-benar berwujud pada tingkat desa melalui data-data spesifik SDGs Desa, bukan berasal dari pinjaman dari luar desa. Hal itu membuat semakin luas rumusan detail pembangunan desa. Semua ini berguna untuk mengembangkan strategi pembangunan menjadi lebih terkecil, langsung kepada warga desa sehingga cepat merasakan manfaatnya.

Sebagaimana didalamnya berisi tentang program SDGs yang diperkecil menjadi tingkat desa atau disebut dengan SDGs Desa yang bertujuan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap desa.

Sebagai upaya untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka SDGs desa dibagi kedalam 18 (delapan belas) tujuan, sebagai berikut:

- 1: Desa Tanpa Kemiskinan, dilambangkan dengan tabungan jago.
- 2: Desa Tanpa Kelaparan, dilambangkan dengan bakul nasi.
- 3: Desa Sehat dan Sejahtera, dilambangkan dengan detak jantung.
- 4: Pendidikan Desa Berkualitas, dilambangkan dengan warga desa membaca.
- 5: Keterlibatan Perempuan Desa, dilambangkan serupa dengan SDGs.
- 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, dilambangkan dengan kendi berisi air.
- 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, dilambangkan dengan pembangkit listrik dan kincir angin.
- 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dilambangkan dengan pertumbuhan ekonomi pada warga desa bercapung.
- 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, dilambangkan dengan jalan yang sangat panjang.
- 10: Desa Tanpa Kesenjangan, dilambangkan dengan timbangan yang seajar antar penduduk dan warga desa bercapung

- 11: Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, dilambangkan dengan rumah khas desa dengan lingkaran tidak terputus.
- 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, dilambangkan dengan warga desa membuang sampah ke tong sampah yang terseleksi.
- 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim, dilambangkan dengan kebebasan anak-anak bermain air.
- 14: Desa Peduli Lingkungan Laut, dilambangkan dengan nelayan desa menebar jalan dipesisir yang dangkal.
- 15: Desa Peduli Lingkungan Darat, dilambangkan dengan sawah yang subur hingga membuahkan padi beras.
- 16: Desa Damai Berkeadilan, dilambangkan dengan kantong.
- 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dilambangkan dengan hubungan antara warga dan pihak-pihak lain.
- 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, dilambangkan dengan pembangunan desa sesuai mandat menyusun prioritas pembangunan desa kepada KEMENDES. Ditambahkan khusus untuk menunjukkan pembangunan desa di Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menganalisis implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta capaian program apa saja yang sedang dijalankan di Desa Telaga Murni dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* serta di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat.

Dalam menyelenggarakan program-program yang dilakukan oleh desa, seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ataupun ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang penulis ajukan berdasarkan latar belakang di atas diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijalankan di Desa Telaga Murni?
2. Bagaimana fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi untuk mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Telaga Murni?
3. Bagaimana capaian implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Telaga Murni?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijalankan di Desa Telaga Murni.
2. Menganalisis fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Telaga Murni.
3. Menganalisis capaian atas program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijalankan di Desa Telaga Murni.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pada bagian ini berisi tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang ada kaitannya atau relevan dengan topic penelitian. Penelitian-penelitian tersebut berguna untuk memudahkan peneliti dalam memperkaya data dan memunculkan ide-ide yang berkaitan dengan topic peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi program *Sustainable Development Goals* serta implementasi pembangunan berkelanjutan dan penerapan *Sustainable Development Goals* di Desa.

Rujukan pertama pada penelitian ini yaitu pada Jurnal Ilmiah Cakrawati, Volume 4, No.1, hal1-10 berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa tahun 2021 oleh I Wayan Sutrisna, diterbitkan oleh FISIP Universitas Mahendradatta. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi fungsi BPD dalam mewujudkan SDGs Desa. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa BPD sebagai perangkat desa mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, *controlling* dan menyerap aspirasi berperan penting dalam menciptakan proses demokratisasi di desa yang berpengaruh pada suksesnya pembangunan. Pada penerapannya BPD harus diefektifkan perannya agar mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan merancang pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat tumbuh secara maksimal dan tujuan SDGs desa dapat diwujudkan.

Relevansi yang ada pada penelitian Sutrisna memberikan implementasi fungsi BPD dalam penerapan SDGs Desa. Penelitian ini juga membantu peneliti untuk merumuskan bagian latar belakang untuk penelitian ini.

Rujukan kedua yaitu pada Jurnal Selodang Mayang, Volume 5, No.2, Bulan Agustus 2019 tentang Analisa Keselarasan *Sustainable Development Goals* Dengan Program Pembangunan Di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu oleh Roberta Zulphi Surya diterbitkan oleh SDGs Center Universitas Islam Indragiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan program SDGS dengan program pembangunan yang ada di Desa Seresam. pada penelitian ini metode yang digunakan *survey* dan *desk review*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mempercepat pencapaian SDGs, perlu memfokuskan yang menjadi prioritas pembangunan. Salah satunya dengan program memilih salah satu desa percontohan yang disebut dengan desa SDGs. Desa yang terpilih akan menerapkan program pembangunan prioritas yang merujuk pada Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.

Telah disebutkan bahwa Desa Seresam telah sukses mengimplementasikan tujuan SDGs. Relevansinya dengan penelitian ini terlihat pada implementasi program-program capaian 17 SDGs yang berhasil dilakukan di Desa Seresam menjadikan peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana implelementasi yang terjadi di Desa Telaga Murni dan dapat dijadikan saran bagi penerapan di Desa Telaga Murni maka dari itu penelitian ini membantu peneliti dalam merumuskan rumusan masalah yang pertama.

Rujukan ketiga yaitu pada Jurnal Administrasi Publik, Volume 3, No.41 oleh Budiarto Usman, Salmin Dengo, dan Very Y.Londa tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di KEcamatan Galela Kabupaten Halmahera yang diterbitkan tahun 2016 oleh Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya indikasi lemahnya BPD dalam menghadapi kekuasaan Kepala Desa, akibatnya fungsi pengawasan BPD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, BPD cenderung hanya menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Lemahnya kemampuan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyebabkan tidak maksimalnya fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya sudah dilakukan dengan cukup baik.

Relevansinya yaitu membahas peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan di Desa menjadi faktor terpenting dalam kesuksesan pembangunan desa, karena pada kenyataannya masih banyak BPD yang belum berfungsi maksimal maka dari itu peneliti ingin menganalisa bagaimana peran BPD di Desa Telaga Murni dalam keterlibatannya dalam program SDGs dan pengawasan pembangunan untuk itu penelitian ini membantu peneliti dalam merumuskan rumusan masalah bagian kedua.

Rujukan keempat yaitu pada *Padjadjaran Journal of Law*, volume 4, No.3, hal 606-624 oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa diterbitkan pada tahun 2017 oleh Universitas Padjadjaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu dengan adanya UU Desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, sehingga Kepala Desa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengatasi permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan sosial budaya dapat diperkecil.

Hasil penelitian ini menyebutkan fungsi BPD selaku badan pengawas mempunyai fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, masyarakat desa berharap agar BPD dapat menjalankan fungsinya dibidang pengawasan terutama penggunaan dana desa. Di dalam penelitian ini dibahas tentang kinerja BPD dalam mengontrol pemerintahan desa dari segi pengelolaan pengawasan keuangan yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera. Relevansi dengan penelitian ini terdapat pada bagaimana kelembagaan BPD yang terus berubah-ubah tidak hanya perubahan kelembagaan karena regulasi yang mengatur urusan desa, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam merumuskan latar belakang berkaitan dengan kondisi BPD dalam menjalankan urusan pemerintahan desa.

Rujukan kelima yaitu pada eJournal Administrasi Negara, 2016, volume 4, No.1, hal2562-2576 oleh Riska Wuri Handayani tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser diterbitkan oleh Universitas Mulawarman. Latar belakang penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya BPD di Desa Makmur Jaya masih kurang maksimal, dibuktikan adanya kekurangan dalam pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan yang menyebabkan jalan rusak sebelum waktunya serta dalam hal pemerataan pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal itu dilihat dari jembatan RT 009 yang rusak dan belum ada tindakan perbaikan, dan belum terpenuhinya kebutuhan air bersih di Desa Makmur Jaya. Untuk itu masyarakat berharap agar BPD menyalurkan aspirasinya agar dibahas dalam musyawarah desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya perusahaan yang termasuk dalam area Desa Makmur Jaya menyebabkan beberapa daerah tidak terlalu diperhatikan dalam hal pemeliharaan pembangunan. Selain disebabkan karena perusahaan, tidak adanya himbauan dari pemerintah desa untuk saling menjaga juga menjadi penyebab kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak aspirasi masyarakat yang perlu digali kembali baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun nonfisik juga masih perlunya konsistensi antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, peran BPD sudah cukup baik, dilihat dari BPD dalam memberikan masukan terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola dan meningkatkan transparansi keuangan desa. Relevansinya yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Makmur Jaya dimana kelembagaan BPD yang harus diperkuat lagi untuk itu dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari beberapa jurnal yang membahas tentang peran BPD belum efektif. Untuk itu sebagai acuan peneliti dari penelitian ini membantu dalam merumuskan masalah penelitian serta berkontribusi terhadap teori-teori tentang BPD.

Rujukan keenam yaitu pada jurnal *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No.1, Mei 2018, hal31-46 oleh Rintan Purnama Ayu Apriliani tentang Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Pasal 7 UU No.13 Tahun 2011 Menuju *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia 2045 diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena adanya permasalahan pengentasan kemiskinan dengan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sebagai bentuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan dengan adanya potensi yang dimiliki masyarakat di Desa Talok peneliti membuat gagasan untuk diadakannya pendidikan non formal berbasis anyaman bambu.

Relevansinya dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang potensi desa dalam mendukung pencapaian SDGs di Desa Talok dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan program pendidikan non formal berbasis anyaman bambu yang bisa dijadikan acuan peneliti dalam memberikan masukan terhadap program-program SDGs di Desa Telaga Murni sesuai dengan potensi desa serta membantu peneliti dalam menulis teori tentang pembangunan berkelanjutan.

Rujukan ketujuh yaitu pada Jurnal in Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Hilirisasi Hasil Penelitian Melalui Program Pengabdian Berkelanjutan Yogyakarta, Volume 27 tahun 2018 oleh Edy Sprapto, Muhammad Waskito Ardhi dan Davi Apriandi tentang Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui Sistem Padi Organik Di Desa Pojok Kwadungan Ngawi diterbitkan oleh Universitas PGRI Madiun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan nomor 15 dari SDGs yaitu Ekosistem Daratan. Pertanian padi organik mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan dan beras organik yang dihasilkan memiliki nilai tinggi di pasar domestik dan ekspor. Hasil penelitian diketahui bahwa biaya produksi sistem padi organik lebih murah dibandingkan dengan pupu anorganik. Dari nilai jualnya gabah padi organik lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam dengan pupuk kimia. Terhindarnya kerusakan lahan dan terjaganya fungsi lahan merupakan bagian dari upaya untuk mendukung terlaksananya progam SDGs yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia.

Relevansinya dengan penelitian ini membahas implementasi program untuk mewujudkan SDGs berbasis tanaman padi organik. Peneliti merujuk jurnal ini untuk memberikan gambaran untuk melihat potensi desa untuk mendukung program SDGs.

Rujukan kedelapan yaitu *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), volume 3 no.3, hal 1253-1263 tahun 2018 oleh Rina Susanti, Rifardi & Yoskar Kadarisman tentang Peran Masyarakat dalam pencapaian Target *Sustainable Development Goals* Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi diterbitkan oleh Universitas Riau. Latar belakang pada penelitian ini yaitu adanya indikator permasalahan dalam pencapaian target SDGs Desa, terkhusus untuk tujuan nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat jauh dari target. Metode penelitian yang digunakan memakai pendekatan metode survei dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menyebutkan upaya masyarakat Desa Talontam dalam mendukung pencapaian target SDGs *goals* ke 6 dibagi kedalam 2 kategori. Yakni, upaya kelompok masyarakat yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak dan kelompok masyarakat yang telah memiliki akses air minum dan sanitasi layak dalam menjaga keberlanjutannya. Bentuk peran masyarakat dalam upaya mendukung pencapaian target SDGs tersebut berupa tenaga, materiil dan pikiran (terwujud dengan kegiatan pembuatan sumur bor dangkal, tempat mencuci tangan, septik tank tertutup dan sanitasi sesuai standar serta mengikuti penyuluhan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi yang layak).

Relevansinya dengan penelitian ini terdapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan sangatlah penting untuk itu peneliti ingin menganalisis melalui BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* di Desa Telaga Murni.

Rujukan kesembilan yaitu pada Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5 No.3, hal875-888 oleh Nelti Erwandari tentang Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau, diterbitkan oleh Universitas Mulawarman. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sejak tahun 2011 terjadi penurunan lahan sawah yang signifikan, alih fungsi lahan pertanian di Riau menjadi kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran bahwa lahan sawah akan hilang dalam beberapa tahun kedepan. Disebabkan karena petani melihat perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan daripada sawah. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Riau membuat program pembangunan pertanian diprioritaskan untuk tanaman padi. Yaitu program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), dalam implementasinya program OPRM terdapat banyak kendala, hal ini karena program OPRM tersebut lebih banyak berdampak pada perluasan areal sedangkan ekonomi dan sosial kemasyarakatan sangat sedikit. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Relevansi penelitian membantu peneliti dalam memberikan gambaran untuk menuliskan teori-teori tentang implementasi.

Rujukan kesepuluh yaitu pada Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), volume 6 No.2, hal87-92 tahun 2018 oleh Harijono Imbran & Yusrin Hakim tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Baliyohuto, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Latar belakang pada penelitian ini didasarkan atas kurangnya peran BPD Desa Dulohupa dalam pembangunan desa dan kerja sama antar anggota BPD dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dengan adanya pembahasan sebelum pembangunan dan membantu permasalahan serta pembangunan di desa sudah dilaksanakan secara baik walaupun beberapa kali terlihat sepiunya kantor BPD yang mengakibatkan susahya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2016; Imbran & Hakim, 2018; Roza & S, 2018; Sutrisna, 2021; Usmany, 2016). Ada juga beberapa penelitian yang membahas implementasi program *Sustainable Development Goals* di Desa sesuai dengan fokusnya masing-masing (Erwandari, 2017; Purnama & Apriliani, 2018; Sitti Roskina Mas, 2021; Suprpto, 2018; Susanti, 2021). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya yang membahas tentang peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi program *Sustainable Development Goals* saja, di dalam penelitian ini berfokus pada program-program apa saja yang telah berjalan atau sedang dirumuskan.

Penegasan fungsi dan peran BPD serta tentang keberhasilan perencanaan SDGs di Desa Telaga Murni dalam penerapan *Sustainable Development Goals* dan menganalisis peran BPD sebagai perangkat desa dalam keterlibatannya pada implementasi SDGs di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan perkembangan terkait dengan *Sustainable Development Goals* bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi untuk Desa Telaga Murni dalam implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dan bagi Badan Permusyawaratan Desa Telaga Murni sebagai perangkat desa yang terlibat dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat dan terkhususnya untuk masyarakat di Desa Telaga Murni dan agar mendukung program-program yang dijalankan di Desa Telaga Murni.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan masukan terhadap program-program yang akan dijalankan oleh Desa Telaga Murni.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan sistematis maka peneliti membuat sistematika penulisan dengan membaginya kedalam 5 bab, sistematika yang peneliti maksud yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (akademik dan praktis) dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bagian ini menguraikan tentang perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian yang berkaitan dengan peran dan implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang *Sustainable Development Goals* di Desa Telaga Murni.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang paradigma, metode, dan desain penelitian, sumber, teknik pengolahan dan teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian (uji keabsahan data), tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bab ini juga terdapat rekomendasi serta saran-saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran untuk lokasi yang menjadi objek penelitian.